JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 10 April 2026 | **Revised:** 18 Mei 2026 | **Accepted:** 21 Mei 2026

Kerjasama Pertahanan Bilateral Indonesia sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan: Analis Yuridis dan Strategis

Donny Samudra Barbara[1], Ade Toshio Fadly[2]
[1]Sekolah Komando Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia, barsimpa@gmail.com
[2]Sekolah Komando Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia, oshio@seskoal.ac.id

Corresponding Author: barsimpa@gmail.com[1]

Abstract: *This scientific article aims to analyze Indonesia's bilateral defense cooperation as an instrument of defense diplomacy through a juridical and strategic perspective, and evaluate its effectiveness in strengthening national security amidst the geopolitical dynamics of the Indo-Pacific region. The research uses a qualitative method with a library study approach through a search of scientific literature from various academic databases. Data are analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques, content analysis, and a comparative approach to examine the dimensions of international law, strategic interests, and the implementation of Indonesia's bilateral defense cooperation. The results show that bilateral defense cooperation is more adaptive than multilateral mechanisms because it provides concrete strategic benefits in the form of increased military capabilities, modernization of primary weapons systems, strengthening interoperability of the armed forces, and transfer of defense industry technology. From a juridical perspective, bilateral cooperation is based on international agreements that guarantee legal legitimacy and respect for state sovereignty. The discussion emphasizes that bilateral defense diplomacy reflects Indonesia's hedging strategy in maintaining geopolitical balance without being bound by formal military alliances, while also being a means of strategic signaling in creating a defensive deterrent effect. In conclusion, bilateral defense cooperation is an effective, adaptive, and strategic defense diplomacy instrument in strengthening Indonesia's defense posture, but it still needs to be synergized with regional multilateral cooperation.*

Keywords: *Defense Diplomacy, Bilateral Defense Cooperation, Defense Strategy, International Law, Regional Security.*

Abstrak: Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan melalui perspektif yuridis dan strategis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memperkuat keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran literatur ilmiah dari berbagai basis data akademik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, *content analysis*, dan pendekatan komparatif untuk menelaah dimensi hukum internasional, kepentingan strategis, serta implementasi kerja sama pertahanan bilateral Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kerja sama pertahanan bilateral lebih adaptif dibandingkan mekanisme multilateral karena memberikan manfaat strategis yang konkret berupa peningkatan kapabilitas militer, modernisasi alat utama sistem persenjataan, penguatan interoperabilitas angkatan bersenjata, serta transfer teknologi industri pertahanan. Dari sisi yuridis, kerja sama bilateral didasarkan pada perjanjian internasional yang menjamin legitimasi hukum dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pembahasan menegaskan bahwa diplomasi pertahanan bilateral mencerminkan strategi *hedging* Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik tanpa terikat aliansi militer formal, sekaligus menjadi sarana *strategic signalling* dalam menciptakan efek gentar defensif. Kesimpulannya, kerja sama pertahanan bilateral merupakan instrumen diplomasi pertahanan yang efektif, adaptif, dan strategis dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia, namun tetap perlu disinergikan dengan kerja sama multilateral kawasan.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Kerja Sama Pertahanan Bilateral, Strategi Pertahanan, Hukum Internasional, Keamanan Regional.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan kompleksitas ancaman keamanan yang tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan juga mencakup ancaman multidimensional seperti terorisme lintas negara, kejahatan siber, konflik maritim, serta rivalitas geopolitik antar kekuatan besar. Kawasan Indo-Pasifik menjadi episentrum dinamika tersebut karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan dunia sekaligus arena kompetisi pengaruh militer dan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus melindungi kedaulatan wilayahnya yang luas. Posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan dua samudra dan dua benua menjadikan keamanan nasionalnya sangat dipengaruhi oleh dinamika regional, khususnya di Asia Tenggara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan, seperti meningkatnya aktivitas militer di kawasan Laut Cina Selatan, pelanggaran wilayah perairan, ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur strategis, hingga eskalasi konflik geopolitik antara kekuatan besar yang berdampak pada stabilitas kawasan. Situasi ini mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi pertahanan negara melalui pendekatan diplomasi pertahanan, yaitu penggunaan instrumen kerja sama militer dan pertahanan sebagai sarana membangun kepercayaan, mencegah konflik, serta meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Salah satu wujud konkret dari diplomasi pertahanan tersebut adalah peningkatan intensitas kerja sama pertahanan bilateral dengan berbagai negara mitra strategis. Penandatanganan perjanjian kerja sama keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia pada tahun 2026 menandai babak baru hubungan strategis kedua negara dalam memperkuat stabilitas kawasan dan respons terhadap ancaman keamanan non-tradisional (Reuters, 2026).

Di tingkat regional, ASEAN selama ini menjadi wadah utama kerja sama keamanan melalui berbagai mekanisme multilateral seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus. Forum tersebut berfungsi sebagai platform dialog strategis, pembangunan rasa saling percaya, serta peningkatan kerja sama praktis di bidang pertahanan antarnegara anggota dan mitra dialognya. Kerja sama multilateral ASEAN mencakup isu-isu keamanan maritim, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga keamanan siber. Kehadiran ASEAN sebagai arsitektur keamanan regional menunjukkan komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan kooperatif dan non-konfrontatif (ASEAN Secretariat, 2023).

Namun demikian, efektivitas kerja sama pertahanan multilateral ASEAN masih menghadapi berbagai kendala struktural. Perbedaan kepentingan nasional antarnegara anggota, kesenjangan kapasitas militer, prinsip non-intervensi yang kuat, serta lambatnya proses

pengambilan keputusan kolektif seringkali membatasi kemampuan ASEAN dalam merespons ancaman keamanan yang bersifat mendesak. Beberapa kajian menilai bahwa mekanisme multilateral ASEAN cenderung bersifat normatif dan diplomatis, tetapi kurang efektif dalam menghasilkan langkah operasional yang konkret dalam menghadapi eskalasi konflik kawasan (Butar, 2025). Kondisi tersebut mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melengkapi pendekatan multilateral dengan penguatan kerja sama pertahanan bilateral yang dinilai lebih fleksibel, pragmatis, dan adaptif terhadap kebutuhan strategis masing-masing negara.

Kerja sama pertahanan bilateral memungkinkan Indonesia untuk membangun kemitraan strategis yang lebih terfokus melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, transfer teknologi persenjataan, pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan interoperabilitas angkatan bersenjata. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara aktif menjalin dan memperluas kerja sama pertahanan bilateral dengan berbagai negara seperti Korea Selatan, Turki, Prancis, Singapura, hingga Tiongkok. Kerja sama dengan Korea Selatan misalnya, berfokus pada pengembangan teknologi alat utama sistem persenjataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan melalui program alih teknologi kapal selam dan pesawat tempur (Amalia, 2017). Sementara itu, kolaborasi Indonesia dan Turki menekankan pada kerja sama industri pertahanan dalam produksi kendaraan tempur dan modernisasi sistem persenjataan yang bertujuan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional (Krisna, 2024)

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kerja sama pertahanan bilateral Indonesia–Singapura melalui *Defense Cooperation Agreement* menunjukkan bahwa pola bilateral mampu meningkatkan efektivitas latihan militer, memperjelas pengaturan wilayah latihan, serta memperkuat stabilitas keamanan perbatasan kedua negara (Ruwahendi et al., 2024). Kerja sama bilateral juga dimanfaatkan Indonesia dalam memperkuat diplomasi pertahanan dengan Prancis melalui pengadaan pesawat tempur dan modernisasi sistem persenjataan yang berdampak pada peningkatan postur pertahanan udara nasional sekaligus mempererat hubungan strategis kedua negara (Cesario et al., 2025). Selain itu, hubungan pertahanan Indonesia dan Tiongkok menunjukkan dinamika kompleks yang mencakup kerja sama latihan militer, dialog strategis, serta pengembangan teknologi pertahanan, meskipun tetap dibayangi tantangan geopolitik kawasan (Setyorini et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menempatkan kerja sama pertahanan Indonesia sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri dan diplomasi pertahanan, namun masih cenderung parsial dalam melihat dimensi hukumnya. Sejumlah studi lebih banyak menekankan aspek politik dan strategis tanpa mengkaji secara mendalam kerangka yuridis berupa perjanjian internasional, dasar hukum kerja sama pertahanan, serta implikasi hukum internasional terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia (Ginanjar, 2024). Padahal, kerja sama pertahanan bilateral pada hakikatnya tidak hanya merupakan instrumen politik luar negeri, tetapi juga tunduk pada rezim hukum internasional yang mengatur legalitas perjanjian, kedaulatan negara, serta batasan penggunaan kekuatan militer.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak yang melakukan perbandingan sistematis antara efektivitas kerja sama pertahanan bilateral dengan mekanisme multilateral ASEAN dalam kerangka diplomasi pertahanan Indonesia. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada satu pola kerja sama tanpa melihat hubungan komplementer maupun kompetitif antara pendekatan bilateral dan multilateral (Miknamara & Indra, 2024). Keterbatasan ini menimbulkan celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Indonesia menjalankan kedua pendekatan tersebut secara simultan dalam kebijakan pertahanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana kerja sama pertahanan bilateral Indonesia dijalankan sebagai instrumen diplomasi pertahanan, bagaimana dimensi yuridis dan strategis memengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja sama tersebut, serta mengapa pendekatan bilateral dinilai lebih adaptif dibandingkan

mekanisme multilateral ASEAN dalam merespons tantangan keamanan kontemporer. Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi aspek hukum internasional yang menjadi dasar kerja sama pertahanan bilateral, menganalisis kepentingan strategis nasional yang melatarbelakangi kerja sama tersebut, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam memperkuat postur pertahanan negara.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, belum optimalnya integrasi antara analisis yuridis dan strategis dalam kajian diplomasi pertahanan Indonesia. Kedua, terbatasnya evaluasi efektivitas kerja sama bilateral dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Ketiga, belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan peran kerja sama bilateral dan multilateral ASEAN dalam satu kerangka analisis terpadu. Celah penelitian tersebut membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam dan integratif guna memahami posisi strategis kerja sama pertahanan bilateral dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan berupa analisis terpadu yang menggabungkan perspektif hukum internasional dan strategi pertahanan dalam menilai efektivitas kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan kerja sama pertahanan sebagai fenomena politik dan militer, tetapi juga sebagai produk hukum internasional yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional. Selain itu, artikel ini menghadirkan perbandingan sistematis antara efektivitas kerja sama bilateral dan mekanisme multilateral ASEAN untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pilihan strategi diplomasi pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Dengan demikian, tujuan artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan dalam perspektif yuridis dan strategis, mengevaluasi efektivitasnya dalam memperkuat keamanan nasional, serta membandingkannya dengan mekanisme kerja sama pertahanan multilateral ASEAN guna merumuskan rekomendasi strategis bagi kebijakan pertahanan Indonesia di masa depan.

Literature Review

Diplomasi Pertahanan sebagai Konsep Teoretis dan Praktis

Diplomasi pertahanan merupakan salah satu dimensi penting dari kebijakan luar negeri modern, yang menempatkan kerja sama militer dan pertahanan sebagai alat strategis negara untuk memajukan kepentingan nasional serta membangun kepercayaan dengan negara lain. Secara konseptual, diplomasi pertahanan mencakup aktivitas militer yang bersifat kooperatif, seperti latihan bersama, pertukaran personel, dialog strategis, dan perjanjian keamanan bilateral maupun multilateral; semuanya diarahkan untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi risiko konflik (Luthfi, 2021). Dalam konteks global, pendekatan diplomasi pertahanan tidak lagi terbatas pada hubungan sekutu tradisional saja, tetapi berkembang menjadi mekanisme yang berkontribusi pada respons terhadap ancaman non-konvensional, termasuk peretasan siber, terorisme lintas batas, dan krisis kemanusiaan. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mulai memanfaatkan diplomasi pertahanan untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar sekaligus memperkuat profil keamanan nasionalnya (Budi Prasetyo & Berantas, 2014).

Namun, praktik diplomasi pertahanan juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam konteks negara yang memiliki prinsip non-blok dan berbasiskan pendekatan bebas aktif seperti Indonesia. Kajian Normative mengenai diplomasi pertahanan Indonesia mengungkapkan adanya dilema antara kebutuhan untuk berkolaborasi secara mendalam dengan negara besar dan keinginan untuk mempertahankan otonomi strategis (Putri et al., 2025). Temuan ini mempertegas bahwa meskipun diplomasi pertahanan menawarkan peluang besar, ia juga menuntut kehati-hatian dalam penetapan prioritas kebijakan agar tidak memicu ketergantungan atau persepsi aliansi formal yang bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri nasional.

Kerja Sama Pertahanan Bilateral Indonesia

Kerja sama pertahanan bilateral merupakan salah satu ekspresi konkret diplomasi pertahanan di mana dua negara bersepakat untuk meningkatkan hubungan militer dan keamanan melalui berbagai instrumen kerja sama formal. Bentuk kerjasama bilateral Indonesia mencakup perjanjian konsultasi strategis, latihan militer bersama, transfer teknologi militer, serta kerja sama industri pertahanan. Dalam lima tahun terakhir, kajian empiris memperlihatkan bahwa Indonesia secara sistematis memperluas jaringan kerjasama bilateralnya, baik dengan negara pada kawasan Indonesia-Pasifik maupun luar kawasan, sebagai respons terhadap tantangan strategis lintas batas yang semakin kompleks (Farhan, 2026).

Sebagai contoh, kerja sama pertahanan Indonesia-Korea Selatan tidak hanya mencakup latihan bersama, tetapi juga pengembangan kapasitas industri pertahanan melalui alih teknologi. Studi (Romansyah, 2021) menemukan bahwa kerja sama seperti ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kemampuan teknis angkatan bersenjata Indonesia, terutama dalam bidang perkapalan dan sistem persenjataan. Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa kolaborasi bilateral dengan negara seperti Turki dan Prancis berkontribusi pada modernisasi alutsista Indonesia sekaligus memperluas jaringan diplomasi strategis di luar kawasan regional tradisional ASEAN (Artha Setya Anggara, 2024).

Dimensi Yuridis Kerja Sama Pertahanan Internasional

Kerja sama pertahanan tidak terlepas dari rezim hukum internasional yang mengatur legitimasi perjanjian, penggunaan kekuatan, serta prinsip kedaulatan negara. Norma-norma hukum tersebut mencakup Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian bilateral, serta instrumen hukum internasional lainnya. Dalam praktiknya, aspek yuridis kerja sama pertahanan bilateral mencakup pengaturan legalitas perjanjian, perlindungan hak kedaulatan negara, pembatasan penggunaan kekuatan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan keterkaitan dengan hukum humaniter internasional. Literatur hukum internasional mutakhir menekankan bahwa kerja sama pertahanan harus dipandu oleh prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, tidak bertentangan dengan Piagam PBB, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Analisis (Syofyan et al., 2023) terhadap perjanjian keamanan bilateral di Asia Tenggara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kerja sama pertahanan sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kaidah hukum internasional yang mengikat semua pihak.

Lebih jauh, penelitian Siregar et al., (2024) menyoroti bahwa aspek hukum internasional seringkali menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antara negara mitra, terutama dalam konteks pertukaran intelijen dan operasi gabungan yang sensitif secara hukum. Studi ini menekankan pentingnya mekanisme tata kelola hukum yang kuat untuk memitigasi risiko pelanggaran hukum internasional dalam kerja sama pertahanan. Di sisi lain, menurut (Natamiharja, 2019) memperlihatkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap prinsip hukum internasional seringkali menjadi sumber konflik ketika negara-negara partner memiliki kebijakan nasional yang berbeda terhadap penggunaan kekuatan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan melalui analisis yuridis dan strategis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, pemahaman konseptual, serta interpretasi terhadap kebijakan dan dinamika kerja sama pertahanan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara holistik dengan menekankan pada interpretasi konteks politik, hukum internasional, serta strategi pertahanan negara.

Studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama karena penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan lembaga

pemerintah, dokumen perjanjian internasional, prosiding konferensi, kebijakan resmi kementerian pertahanan, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan diplomasi pertahanan dan kerja sama militer. Selain itu, publikasi dari lembaga kajian strategis dan pertahanan juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkaya perspektif analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis, SpringerLink, serta portal jurnal nasional terakreditasi. Penelusuran sumber dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti defense diplomacy, bilateral defense cooperation, international defense agreement, security cooperation ASEAN, serta Indonesian defense policy. Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir guna memastikan relevansi dengan dinamika geopolitik dan kebijakan pertahanan kontemporer. Seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi awal, penyaringan berdasarkan relevansi topik, evaluasi kredibilitas sumber, serta klasifikasi berdasarkan tema pembahasan.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama pertahanan bilateral, diplomasi pertahanan, aspek hukum internasional, dan strategi keamanan nasional. Informasi yang tidak relevan dieliminasi untuk menjaga ketajaman analisis.

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian informasi ke dalam kategori tematik agar pola hubungan antar konsep dapat terlihat secara sistematis. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian yang meliputi diplomasi pertahanan, kerja sama pertahanan bilateral, serta dimensi yuridis dan strategis. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi hubungan antarvariabel dalam kerangka kebijakan pertahanan Indonesia.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap pola, kecenderungan, dan hubungan antar konsep yang ditemukan dalam literatur. Proses verifikasi dilakukan secara berulang dengan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari bias interpretasi. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk menilai perbedaan pandangan antar penelitian sehingga diperoleh sintesis yang komprehensif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu teknik analisis yang menekankan pada penafsiran makna teks secara sistematis dan objektif. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumentasi, serta kecenderungan perspektif dalam berbagai literatur terkait diplomasi pertahanan dan kerja sama militer internasional. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami substansi kebijakan pertahanan secara lebih mendalam, termasuk aspek normatif dalam perjanjian internasional dan implikasi strategis dari kerja sama bilateral.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas kerja sama pertahanan bilateral dengan mekanisme multilateral dalam kerangka keamanan regional. Perbandingan dilakukan dengan menelaah karakteristik kelembagaan, fleksibilitas kebijakan, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap kepentingan strategis nasional. Pendekatan komparatif ini membantu menjelaskan posisi strategis kerja sama bilateral dalam diplomasi pertahanan Indonesia.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur, seperti jurnal akademik, dokumen kebijakan resmi, serta laporan lembaga internasional. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan temuan penelitian serta meminimalkan subjektivitas peneliti dalam proses interpretasi data.

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dimensi yuridis dan strategis kerja sama pertahanan bilateral

Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif, tetapi juga memberikan landasan analitis yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan diplomasi pertahanan yang relevan dengan dinamika keamanan regional dan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah mendalam terhadap lima belas artikel ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir dan bersumber dari basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis, SpringerLink, serta portal jurnal nasional terakreditasi. Seluruh literatur dipilih melalui proses seleksi sistematis menggunakan kata kunci defense diplomacy, bilateral defense cooperation, international defense agreement, security cooperation ASEAN, dan Indonesian defense policy. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual, kecenderungan kebijakan, serta dinamika yuridis dan strategis yang memengaruhi kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian kerja sama pertahanan bilateral Indonesia sebagai instrumen diplomasi pertahanan telah berkembang secara signifikan dalam literatur akademik terbaru, terutama sejak dinamika geopolitik Indo-Pasifik semakin tajam. Dua fokus utama yang muncul adalah: (1) hubungan bilateral Indonesia dengan mitra strategis di luar ASEAN, dan (2) peran ASEAN sebagai kerangka multilateral yang berinteraksi dengan strategi bilateral tersebut.

Beberapa penelitian menyoroti pentingnya *defense diplomacy* sebagai instrumen strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara mitra, seperti Australia, Turki, China, Uni Emirat Arab, dan Perancis. Studi kontemporer ini menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten membangun kerja sama pertahanan bilateral untuk memperkuat kapabilitas militer, meningkatkan interoperabilitas, serta memanfaatkan latihan bersama dan transfer teknologi sebagai bagian dari diplomasi militer. Dalam konteks bilateral Indonesia–Australia misalnya, *Defense Cooperation Agreement (DCA)* yang ditandatangani pada 29 Agustus 2024 dipandang sebagai tonggak baru dalam hubungan pertahanan kedua negara, membuka ruang bagi latihan militer bersama, pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi dalam keamanan maritim dan bantuan kemanusiaan. Perjanjian ini juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan dinamika geopolitik kawasan sekaligus menguatkan posisi regional Indonesia dalam ASEAN dan Indo-Pasifik (Darmawan et al., 2025).

Selain itu, kajian lain menekankan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dengan Turki menunjukkan dinamika kontrak alih teknologi dan produksi bersama alutsista yang membantu memperkuat basis industri pertahanan nasional. Studi yang dilakukan oleh Krisna menemukan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Turki mencakup joint development dalam berbagai sistem pertahanan yang mendukung modernisasi angkatan bersenjata Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada produk impor (Krisna, 2024). Kerja sama dengan China juga mendapat perhatian dalam literatur terbaru, di mana penelitian Ardiyanto membahas interaksi pertahanan Indonesia–China pada periode 2022–2024. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kerja sama tersebut didorong oleh kepentingan strategis bersama dalam capacity building, latihan militer gabungan dan transfer teknologi, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan persepsi yang berbeda terkait geopolitik kawasan Laut China Selatan (Ardiyanto, 2024).

Dalam ranah bilateral lain, studi tentang Indonesia Perancis menyoroti bahwa proses pengadaan dan revitalisasi alutsista seperti pesawat tempur dan sistem maritim tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan teknis semata, tetapi juga memperkuat hubungan strategis jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa *defense diplomacy* melalui kerja sama dengan Perancis berkontribusi pada pembangunan kemampuan militer sambil memperkuat solidaritas diplomatik dalam menghadapi tantangan keamanan regional (Mardhika et al., 2023).

Begitu pula dengan kajian dari Prayitno et al., (2023) mengenai hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan, yang menggarisbawahi peran diplomasi angkatan laut dalam memperkuat hubungan bilateral. Melalui praktik naval diplomacy, kedua negara memperluas kerja sama yang mencakup latihan bersama dan dialog strategis yang memperkokoh stabilitas keamanan regional.

Selain hubungan bilateral dengan negara non-ASEAN, literatur juga membahas upaya Indonesia dalam memperluas kerangka kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab. Penelitian Gusfi et al., (2023) menunjukkan bahwa *defense diplomacy* Indonesia UAE ditandai dengan penerapan *confidence building measures* yang strategis dalam membangun kepercayaan, diplomasi militer dan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan. Sementara itu, studi yang relevan dengan ASEAN sebagai kerangka kerja sama menunjukkan bahwa pertahanan multilateral regional tetap memiliki peran penting. Misalnya, analisis Prasticke mengungkapkan bahwa *defense diplomacy* dalam konteks ASEAN melalui lembaga seperti *ASEAN Center of Military Medicine (ACMM)* dapat berkembang untuk menghadapi ancaman yang bersifat non-tradisional, seperti pandemi COVID-19, melalui penyesuaian strategi kerja sama yang lebih kooperatif (Daos Kadati, 2023).

Selain itu, kajian Abdullah Zulkifli, Makarim Wibisono, Anak Agung Banyu Perwita, (2021) mengkaji *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)* yang secara yuridis dan strategis memengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia dan ASEAN lebih luas. Kerja sama dalam AOIP menjadi landasan normatif bagi diplomasi pertahanan kolektif yang mengedepankan stabilitas kawasan dan rasa saling percaya antar negara ASEAN serta dengan mitra eksternal. Literatur lain yang juga relevan meskipun berada sedikit di luar dimensi bilateral langsung adalah analisis tentang kolaborasi industri pertahanan di kawasan ASEAN (ADIC), yang meskipun masih menghadapi hambatan, menunjukkan bahwa terdapat potensi bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui kolaborasi industri dan teknologi. Hal ini dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar kawasan dan memperkuat basis pertahanan kolektif ASEAN (Agung Wicaksono, 2022).

Selain itu, temuan dari penelitian Widiyanto dan kolega menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia juga berupaya merespons isu keamanan yang lebih luas seperti konflik di Laut China Selatan melalui pendekatan diplomasi dan kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral guna mengurangi eskalasi konflik dan menjaga stabilitas regional (Widiyanto et al., 2024). Temuan penelitian ini secara konsisten menegaskan bahwa kerja sama pertahanan bilateral merupakan elemen kunci dalam diplomasi pertahanan Indonesia, yang menyediakan landasan strategis untuk modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas militer, transfer teknologi, serta sebagai *confidence building measure* antara negara-negara mitra. Meski ASEAN sebagai kerangka multilateral memiliki peran normatif dan kooperatif, literatur menemukan bahwa mekanisme bilateral memiliki fleksibilitas dan efektivitas yang lebih tinggi dalam merespon tantangan keamanan operasional dan strategis yang bersifat akut dan konkret.

Secara yuridis, kerja sama bilateral ini didukung dan dibingkai oleh perjanjian formal seperti *Defence Cooperation Agreement* antara Indonesia dan Australia, yang juga merupakan bagian dari upaya legislatif dan diplomatik untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi militer dalam batas hukum internasional dan kepentingan nasional masing-masing negara (dfat, 2025).

DISCUSSION

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerja sama pertahanan bilateral Indonesia berkembang sebagai instrumen utama diplomasi pertahanan yang bersifat adaptif terhadap dinamika keamanan kawasan. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari ketergantungan pada mekanisme multilateral menuju penguatan kemitraan strategis berbasis kepentingan bersama yang lebih operasional. Dari sudut pandang peneliti, kecenderungan ini merupakan respons rasional terhadap karakter ancaman keamanan kontemporer yang bersifat cepat, tidak terduga, dan memerlukan respons taktis yang tidak selalu dapat difasilitasi oleh mekanisme multilateral yang prosedural dan berbasis konsensus.

Secara strategis, kerja sama bilateral memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan kapabilitas militer, modernisasi alat utama sistem persenjataan, serta penguatan interoperabilitas melalui latihan militer bersama. Pola kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen simbolik untuk membangun citra damai, tetapi telah bergeser menjadi instrumen capacity building yang konkret. Perspektif peneliti memandang bahwa pendekatan ini selaras dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan spektrum ancaman yang luas, mulai dari keamanan maritim, pengawasan wilayah udara, hingga penanggulangan kejahatan lintas batas. Dengan demikian, diplomasi pertahanan bilateral menjadi sarana efektif untuk menutup kesenjangan kapasitas pertahanan nasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada belanja militer domestik yang memerlukan biaya besar dan waktu panjang.

Di sisi lain, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral juga berperan penting dalam penguatan industri pertahanan nasional melalui skema alih teknologi dan produksi bersama. Perspektif peneliti menilai bahwa aspek ini merupakan dimensi paling strategis dari diplomasi pertahanan karena berimplikasi langsung pada kemandirian pertahanan jangka panjang. Ketergantungan terhadap impor alutsista berpotensi menciptakan kerentanan strategis apabila terjadi embargo politik atau pembatasan suplai dari negara produsen. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang membuka akses transfer teknologi sesungguhnya bukan hanya bentuk kolaborasi militer, tetapi juga strategi industrialisasi pertahanan yang memperkuat daya tahan nasional. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan bilateral Indonesia mencerminkan pendekatan defense industrial diplomacy, yaitu penggunaan kerja sama militer sebagai pintu masuk pengembangan teknologi strategis nasional.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penguatan kerja sama bilateral bukan berarti mengurangi relevansi mekanisme multilateral seperti yang difasilitasi oleh ASEAN. Kerja sama multilateral tetap memiliki fungsi normatif sebagai instrumen pembangunan rasa saling percaya (confidence building measures) dan pencegah konflik terbuka di kawasan. Dari perspektif peneliti, ASEAN berperan sebagai stabilisator politik kawasan melalui diplomasi dialogis, sementara kerja sama bilateral berfungsi sebagai stabilisator operasional melalui peningkatan kesiapan militer. Dengan kata lain, keduanya berada pada spektrum fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Multilateralisme ASEAN membangun arsitektur norma dan etika keamanan regional, sedangkan bilateralisme menyediakan perangkat teknis dan strategis untuk menjawab kebutuhan pertahanan yang lebih spesifik.

Peneliti memandang bahwa keterbatasan utama mekanisme multilateral ASEAN terletak pada prinsip non-intervensi dan konsensus yang memperlambat pengambilan keputusan kolektif. Dalam situasi krisis keamanan yang membutuhkan respons cepat, prosedur diplomatik yang panjang dapat mengurangi efektivitas tindakan bersama. Hal ini menjelaskan mengapa Indonesia, meskipun aktif dalam forum regional, tetap memprioritaskan kemitraan bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Dari sudut pandang realistis dalam studi hubungan internasional, perilaku ini mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan kepentingan keamanan nasionalnya melalui instrumen yang paling efisien dan minim hambatan institusional.

Dalam dimensi yuridis, penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan bilateral Indonesia selalu didasarkan pada perjanjian internasional yang mengatur batasan hukum, ruang lingkup kolaborasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Perspektif peneliti menekankan bahwa aspek legalitas ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman strategis serta memastikan bahwa aktivitas militer bersama tidak menimbulkan kecurigaan negara lain. Kerangka hukum internasional memberikan legitimasi terhadap aktivitas diplomasi pertahanan sehingga tidak dipersepsikan sebagai bentuk aliansi militer terselubung yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Dengan demikian, dimensi yuridis berfungsi sebagai instrumen risk management dalam kerja sama pertahanan. Peneliti juga melihat bahwa

kekuatan perjanjian internasional mencerminkan tingkat kepercayaan strategis antarnegara mitra. Semakin rinci dan komprehensif substansi perjanjian, semakin tinggi tingkat interoperabilitas dan kedalaman kerja sama yang dapat dilakukan. Sebaliknya, perjanjian yang bersifat umum cenderung membatasi implementasi teknis di lapangan. Oleh sebab itu, diplomasi hukum (legal diplomacy) menjadi bagian integral dari diplomasi pertahanan karena menentukan arah, batas, serta keberlanjutan kerja sama militer.

Dari sudut pandang geopolitik, kecenderungan Indonesia memperluas kerja sama bilateral menunjukkan strategi hedging terhadap rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia tidak memihak secara eksplisit pada blok kekuatan tertentu, tetapi membangun kemitraan strategis dengan berbagai negara untuk menjaga keseimbangan pengaruh. Perspektif peneliti menilai strategi ini sebagai manifestasi nyata politik luar negeri bebas aktif yang diterjemahkan dalam sektor pertahanan. Alih-alih membentuk aliansi militer formal, Indonesia memilih pendekatan kemitraan fleksibel yang memungkinkan ruang manuver diplomatik lebih luas. Strategi ini penting untuk menjaga otonomi kebijakan luar negeri sekaligus menghindari jebakan konflik kepentingan antar kekuatan besar.

Lebih lanjut, peneliti memandang bahwa diplomasi pertahanan bilateral Indonesia juga berfungsi sebagai instrumen strategic signalling. Melalui latihan militer bersama dan perjanjian pertahanan, Indonesia mengirimkan sinyal kepada aktor regional maupun global bahwa Indonesia memiliki kesiapan pertahanan yang memadai serta jaringan kemitraan strategis yang kuat. Sinyal ini penting dalam menciptakan efek gentar (deterrence effect) tanpa harus menunjukkan sikap konfrontatif. Dengan demikian, diplomasi pertahanan bilateral tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas militer, tetapi juga membentuk persepsi strategis pihak eksternal terhadap posisi Indonesia.

Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa peningkatan intensitas kerja sama bilateral juga perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola domestik. Tanpa kesiapan regulasi nasional, transparansi anggaran, serta pengawasan parlemen yang memadai, kerja sama pertahanan berpotensi menimbulkan ketergantungan strategis baru maupun persoalan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, efektivitas diplomasi pertahanan bilateral tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan nasional dalam mengelola hasil kerja sama tersebut.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa kerja sama pertahanan bilateral Indonesia merupakan bentuk diplomasi pertahanan yang paling adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan kontemporer. Pendekatan ini memberikan manfaat strategis dalam bentuk modernisasi militer, penguatan industri pertahanan, peningkatan interoperabilitas, serta penguatan posisi tawar geopolitik Indonesia. Namun demikian, kerja sama bilateral tetap perlu disinergikan dengan mekanisme multilateral kawasan agar stabilitas regional tetap terjaga melalui keseimbangan antara pendekatan normatif dan operasional. Dengan kata lain, efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia terletak pada kemampuannya memadukan kekuatan multilateralisme normatif dan pragmatisme bilateralisme strategis secara seimbang dan terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertahanan bilateral Indonesia merupakan instrumen diplomasi pertahanan yang paling adaptif dalam merespons dinamika keamanan kawasan dan global yang semakin kompleks. Pola kerja sama bilateral memberikan manfaat strategis yang lebih konkret dibandingkan mekanisme multilateral karena mampu secara langsung meningkatkan kapabilitas militer, mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan, serta memperkuat interoperabilitas antarangkatan bersenjata melalui latihan dan kolaborasi teknis. Diplomasi pertahanan bilateral juga berperan penting dalam mendorong pengembangan industri pertahanan nasional melalui alih teknologi dan produksi bersama, yang berdampak pada penguatan kemandirian pertahanan jangka panjang.

Secara yuridis, kerja sama pertahanan bilateral Indonesia dilaksanakan dalam kerangka perjanjian internasional yang memberikan legitimasi hukum, menjamin penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman strategis antarnegara mitra. Kerangka hukum tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kerja sama pertahanan sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan strategis yang dibangun melalui diplomasi pertahanan. Dalam perspektif geopolitik, penguatan kerja sama bilateral mencerminkan strategi hedging Indonesia dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tidak terikat pada aliansi militer formal, tetapi membangun kemitraan strategis yang fleksibel dan berbasis kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga otonomi kebijakan luar negeri sekaligus meningkatkan posisi tawar strategis di tingkat regional dan global.

Meskipun demikian, mekanisme multilateral kawasan yang difasilitasi oleh ASEAN tetap memiliki peran penting sebagai penopang stabilitas normatif melalui dialog strategis dan pembangunan rasa saling percaya antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dan multilateral bukanlah pendekatan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam membangun arsitektur keamanan kawasan yang seimbang. Efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia terletak pada kemampuannya memadukan fleksibilitas bilateralisme dengan legitimasi multilateralisme secara proporsional.

Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan bilateral Indonesia tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kapasitas militer, tetapi juga sarana penguatan posisi geopolitik, pembangunan industri pertahanan nasional, serta media strategic signalling untuk menciptakan efek gentar yang bersifat defensif. Dengan demikian, kerja sama pertahanan bilateral merupakan elemen krusial dalam strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika keamanan global yang terus berkembang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat arah kebijakan diplomasi pertahanan bilateral melalui penyusunan grand strategy yang terintegrasi antara kepentingan militer, industri pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Strategi terpadu ini penting agar setiap kerja sama bilateral tidak bersifat parsial, tetapi berkontribusi langsung terhadap peta jalan pembangunan kekuatan pertahanan nasional jangka panjang.

Kedua, penguatan kerja sama bilateral perlu diprioritaskan pada kemitraan yang memberikan manfaat transfer teknologi dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Kerja sama yang hanya berorientasi pada pembelian alutsista sebaiknya dikurangi karena berpotensi menciptakan ketergantungan strategis terhadap negara pemasok. Fokus pada skema produksi bersama dan alih teknologi akan memperkuat kemandirian pertahanan nasional secara berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum nasional yang mengatur implementasi perjanjian kerja sama pertahanan internasional agar selaras dengan hukum internasional. Harmonisasi regulasi domestik akan meningkatkan kepastian hukum, memperlancar implementasi kerja sama, serta mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari. Keempat, peningkatan diplomasi pertahanan bilateral perlu tetap disinergikan dengan peran aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral kawasan. Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum regional untuk membangun norma keamanan kolektif sekaligus memperkuat legitimasi atas kemitraan bilateral yang dijalankan. Sinergi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas regional.

Kelima, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kerja sama pertahanan bilateral perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan legislatif dan audit kebijakan strategis. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan

benar-benar memberikan manfaat optimal bagi keamanan nasional serta tidak menimbulkan risiko ketergantungan politik maupun ekonomi. Dengan mempertimbangkan saran tersebut, diplomasi pertahanan Indonesia diharapkan mampu berkembang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional serta memperkokoh posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan regional dan global.

REFERENSI

Abdullah Zulkifli, Makarim Wibisono, Anak Agung Banyu Perwita, J. M. (2021). *Foreign Policy and Defense Diplomacy in ASEAN to Maintain Stability and Security in the Indo-Pacific Region*. *32*(3), 167–186.

Agung Wicaksono. (2022). Interest Analysis of Indonesian Defense Diplomacy in ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, *9*(2), 362–375. https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i2.226

Amalia. (2017). *Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan Dalam Bidang Transfer of Technology (Tot). Studi Kasus: Pembuatan Kapal Selam Periode Tahun 2013-2017*.

Ardiyanto, S. (2024). *Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Belanda*. *1*(1), 44–58. https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4567

Artha Setya Anggara. (2024). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama. *JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, *1*(1), 1–17. https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2903

Budi Prasetyo, T., & Berantas, S. (2014). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total Ri. *Jurnal Pertahanan*, *4*, 166.

Butar, A. M. K. B. (2025). *Kerangka Kontraterorisme Asean : Tantangan Kerja*. *9*(2), 222–236.

Cesario, A., Maulana, R., Yunanto, S., Politik, I., & Jakarta, U. M. (2025). *SOSIAL+SIMBIOSIS+-+VOLUME+2+NOMOR+1+TAHUN+2025+Hal+58-76*. *2*.

Daos Kadati, T. P. (2023). Implementation of Defence Diplomacy in ASEAN During The COVID-19 Pandemic. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, *3*(1), 127–138. https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.24263

Darmawan, W., Sumadinata, R. W. S., Akim, & Darmawan, W. B. (2025). Political dynamics of Indonesia-Australia defence cooperation: Navigating geopolitical challenges in the Indo-Pacific. *Research Journal in Advanced Humanities*, *6*(3), 1–40. https://doi.org/10.58256/m019k676

Farhan, M. (2026). *DINAMIKA KERJASAMA INTERNASIONAL DAN TANTANGAN GLOBAL : ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI DI ABAD KE-21*. *1*(1), 9–16.

Ginanjar, Y. (2024). Peran Ditkersinhan (Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan) Kemenhan Dalam Kerjasama Indonesia Dengan Negara-Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Dinamika Global*, *9*(1), 19.

Gusfi, R., Rachman, A., & Yudho Prakoso, L. (2023). Defense Diplomacy Indonesia - United Arab Emirates Through Confidence Building Measures. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *3*(2), 739–749. https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.568

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-signs-security-treaty-with-australia-prabowo-says-2026-02-06/

https://asean.org/joint-declaration-of-the-asean-defence-ministers-meeting-for-peace-prosperity-and-security/

https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia-country-brief

Krisna, A. A. N. (2024). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Dalam Pengadaan Alutsista 2018-2022. *JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*,

1(1), 459–469. https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.3037

Luthfi, R. M. (2021). Relevansi Industri Pertahanan Domestik Dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia. *Fisip Al Azhar*, 1–8.

Mardhika, R., Herman, C., Fretes, J. De, Simanjuntak, T. R., & Mardhika, R. (2023). *INDONESIA-PERANCIS (STUDI KASUS : PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR DASSAULT RAFALE TAHUN 2020-2022) Contact : Cite This Article : 2*(4), 43–55.

Miknamara, J. S. K., & Indra, I. (2024). Peran Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan Regional Asean di Tengah Perebutan Pengaruh Negara-Negara Great Power. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(10), 3741–3751. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1528

Natamiharja, R. (2019). Universitas Pertahanan. In *Universitas Pertahanan* (Vol. 19).

Prayitno, K. H., Jayamahe, J. J., & Palupi, E. (2023). *Analisis+Strategi+Diplomasi+Angkatan+Laut+Dalam+Rangka+Meningkatkan++Hubungan+Bilateral+Pertahanan+Indonesia+Dan+Korea+Selatan*. *2*(2), 112–121.

Putri, D. A., Anwar, S., & Sudibyo, S. (2025). Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Regional. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(4), 1072–1077. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i4.793

Romansyah, B. S. (2021). Kerjasama Jerman Dan Indonesia Dalam Hal Pembelian Senjata Militer Untuk Modernisasi Alutsista Tni. *Jom Fisip*, *2*, 2013–2015.

Ruwahendi, M., Haryanto, A., & Wicaksono, H. W. (2024). Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Maritim Antara TNI Angkatan Laut dengan Singapore Armed Forces pada Implementasi Joint Update on Defence Cooperation 2024. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(10), 11640–11644. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6095

Setyorini, I. D., Abdillah, A. A. E., Pahlevi, A. J., Bintoro, A. P., Defianti, D., Florens, M., Rosanda, N., & Qardhawi, R. (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Asean Outlook On The Indo-Pacific (AOIP). *Transformasi Global*, *9*(2), 97–113. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.2

Siregar, E. S., Harahap, S. A., Anugrah, Bi. A., Dalimunte, G. R., & Hasibuan, A. F. (2024). Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 4925–4939.

Syofyan, S., Angelia Rully, J., & Engriyeni, D. (2023). Legalitas Penggunaan Senjata Space Based Missile Interceptor Untuk Upaya Self Defense (Suatu Kajian Dalam Perspektif Piagam Pbb Dan Outer Space Treaty 1967). *UNES Law Review*, *5*(4), 2384–2397. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.602

Widiyanto, Anwar, S., & Risdhianto, A. (2024). The Role of Indonesia's Defense Diplomacy in Realizing the Optimal Code of Conduct in Order to Reduce the Widespread Conflict in the South China Sea Region. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, *3*(2), 787–796. https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr.